



PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH TERINTEGRASI DI KOTA SEMARANG

Risky Yustiani P, Retnayu Prasetyanti, Hamidah Rosidanti S

Politeknik STIA LAN Jakarta

risky.yustiani@gmail.com retnayu.prasetyanti@gmail.com

hamidah.susilatun@gmail.com

ABSTRACT, The concentration of the population in urban areas, the number of decent housing that does not meet the needs, and the economic gap creates slum settlements that give rise to social, health problems and damage the aesthetics of urban planning. With the issuance of Law no. 1 of 2011 the government targets to increase the number of decent and healthy settlements, especially for 30 priority cities/regencies in Indonesia. This policy is in line with the implementation of the Sustainable Development Goals program on poverty, inequality and sustainable cities and communities. As one of the priority areas, the city of Semarang has succeeded in conjuring the face of the slums. This study tries to present an analysis related to the practice of structuring slums through a case study in Randusari Village. The main aspects analyzed are the form of integration, coordination, participation, and the model of slum settlement arrangement. This study uses a qualitative approach with descriptive research methods that combine literature review research techniques and secondary data. The results of the study explain that the KOTAKU program helps the government in overcoming the problem of slum settlements and the welfare of the local community. The thematic village and rainbow village schemes that are implemented have interrelated objectives, namely 4E (ethos, ecosystem, education and economy). The success of the top-down bottom-up policy model in this program is carried out with community participation from the planning to evaluation stages so as to create sustainable innovation in residential areas, either in cooperation or delegation of power.

Keywords: Slums, Integration, Coordination, Participation

ABSTRAK, Terpusatnya penduduk di wilayah perkotaan, jumlah hunian layak yang belum mencukupi kebutuhan, dan *gap* ekonomi menciptakan pemukiman kumuh yang melahirkan masalah sosial, kesehatan dan merusak estetika penataan kota. Dengan terbitnya UU No. 1 tahun 2011 pemerintah menargetkan peningkatan jumlah permukiman layak dan sehat terutama untuk 30 Kota/Kabupaten prioritas di Indonesia. Kebijakan ini senada dengan implementasi program *Sustainable Develeopment Goals* tentang kemiskinan, ketidaksetaraan serta kota dan komunitas berkelanjutan. Sebagai salah satu daerah prioritas, Kota Semarang berhasil menyulap wajah permukiman kumuh tersebut. Penelitian ini berusaha menyajikan analisis terkait praktik penataan permukiman kumuh melalui studi kasus di Kelurahan Randusari. Aspek utama yang dianalisis adalah bentuk integrasi, koordinasi, partisipasi, serta model penataan permukiman kumuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif yang mengkombinasikan teknik penelitian literature review dan data sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa program KOTAKU membantu pemerintah dalam mengatasi masalah permukiman kumuh dan kesejahteraan masyarakat setempat. Skema kampung tematik dan kampung pelangi yang diterapkan mempunyai tujuan yang saling berkaitan satu dan yang lainnya yaitu 4E (etos, ekosistem, edukasi dan ekonomi). Keberhasilan model kebijakan *top-down bottom-up* pada program ini terselenggara dengan keikutsertaan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan hingga evaluasi sehingga menciptakan inovasi berkelanjutan di lingkungan permukiman baik dalam kerjasama atau pendelegasian kekuasaan.

Kata kunci: Pemukiman Kumuh, Integrasi, Koordinasi, Partisipasi

PENDAHULUAN

Kebutuhan dan kepemilikan hunian yang layak dalam lingkungan yang sehat menjadi salah satu bentuk kebutuhan dasar manusia selain kebutuhan sandang, dan pangan. Berdasarkan data dari Kementerian PUPR per Agustus 2019, Indonesia masih membutuhkan 43jt Unit rumah layak huni yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia. Pada wilayah kota khususnya kebutuhan permukiman layak huni tidak sebanding dengan ketersediaan lahan dan kemampuan kota dalam menyediakan infrastruktur permukiman yang terintegrasi dengan akses pelayanan publik, hal ini juga di dukung dengan laju urbanisasi yang begitu pesat di wilayah perkotaan sebagai pusat pemerintahan, ekonomi dan distribusi. Komposisi penduduk perkotaan yang terus meningkat dan beragam menciptakan masyarakat yang berpenghasilan rendah yang menyebabkan adanya *gap* ekonomi. faktor-

faktor tersebutlah yang kemudian menciptakan kawasan permukiman kumuh dan jauh dari sentuhan modernisasi yang ada di Kawasan perkotaan.

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pasal 1 ayat (1), permukiman kumuh adalah “permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat”. Permukiman kumuh menciptakan *poor ecosystem* yang mengancam kualitas kehidupan baik lingkungan fisik ataupun non-fisik dan merusak tatanan estetika kota. Tata Kelola permukiman kumuh sendiri sudah ada dalam peraturan perundang-undangan dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Untuk menyelesaikan permasalahan permukiman, perspektif *smart city* dan *sustainable urban neighborhood* bisa menjadi acuan pembangunan dan penyediaan fasilitas permukiman yang layak, sehat, dan berkelanjutan. Permukiman kumuh terintegrasi juga telah menjadi prioritas pemerintah untuk mendukung program *Sustainable Development Goals* poin 1 “*no poverty*”, poin 10 “*reduced inequalities*” dan poin 11 “*sustainable cities and communities*”. Untuk mendukung hal tersebut Kementerian PUPR sudah menargetkan peningkatan jumlah permukiman layak dan sehat terutama untuk 30 Kota/Kabupaten prioritas di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Motor penggerak dalam penataan permukiman kumuh terintegrasi adalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah beserta *non-state actors*. Koordinasi *multi-leveled government* sendiri dilakukan untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi, mengurangi tumpang tindih wewenang dan mendukung efektivitas pembagian kerja (Ndraha, 2003).

Kesuksesan Kota Semarang dalam merubah wajah permukiman kumuh, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentu patut diapresiasi, bahkan diteliti lebih lanjut. Secara empiris, penataan permukiman kumuh berbasis wisata tematik dengan prinsip berkelanjutan menjadi *best practice* yang menekankan pada aspek keterlibatan dan kebermanfaatannya. Dalam konteks ini, perubahan tatanan lingkungan dan daya tarik Kota Semarang sebagai lokus wisata telah menjelma sebagai fenomena sosial yang menarik untuk diteliti. Dari perspektif teori dan hasil studi literatur berupa penelitian terdahulu, terdapat beberapa indikator utama yang menentukan keberhasilan penataan permukiman kumuh terintegrasi, diantaranya: (1) koordinasi pemerintah pusat dan daerah dari berbagai sektor; (2) partisipasi masyarakat; (3) penerapan prinsip keberlanjutan.

Program prioritas penataan permukiman kumuh di Kota Semarang juga melibatkan banyak pemangku kepentingan di berbagai level dan afiliasi. Dalam hal ini, koordinasi yang baik didasarkan pada penerapan model koordinasi yang tepat dalam penataan permukiman kumuh terintegrasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Handyaningrat (1989) bahwa model koordinasi yang baik mencakup beragam indikator diantaranya, (1) komunikasi; (2) kesadaran pentingnya koordinasi; (3) kompetensi partisipan; (4) kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi; dan (5) kontinuitas perencanaan.

Penelitian ini berusaha menyajikan analisis terkait praktik penataan permukiman kumuh melalui studi kasus. Aspek utama yang dianalisis adalah bentuk integrasi, koordinasi, partisipasi, serta pola/model penataan permukiman kumuh. Harapannya, melalui penelitian studi kasus ini, diperoleh referensi empiris terkait implementasi integrasi, koordinasi, dan pola/model penataan permukiman kumuh terintegrasi dan dapat memberikan kebermanfaatannya bagi praktik pembangunan dan perkembangan keilmuan.

KAJIAN TEORITIS

1. Penataan Permukiman Kumuh

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada pasal 1 ayat (1), permukiman kumuh adalah “permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat”. Fenomena permukiman kumuh terjadi akibat perluasan fungsi permukiman pada area non-permukiman karena berbagai faktor pendorong, utamanya adalah kemiskinan (Rahardjo, 2010).

Penataan permukiman kumuh mengacu pada pola dan pendekatan penataan permukiman kumuh. Terdapat pola atau model penataan permukiman kumuh mengacu pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR sebagai alternatif dalam menangani masalah permukiman kumuh di perkotaan antara lain:

- a. Model *Land Sharing I*. Model ini merupakan bentuk penataan ulang di lahan yang tingkat kepemilikan masyarakatnya yang masih tinggi. Ada beberapa syarat yang dilakukan untuk penanganan pada model ini yaitu; (1) tingkat pemilikan secara sah (yang didukung bukti pemilikan/penguasaan atas lahan yang ditematinya) cukup tinggi dengan luasan yang terbatas, (2) tingkat kekumuhan tinggi, dengan ketersediaan lahan yang memadai untuk menempatkan prasarana dan sarana dasar, (3) tata letak bangunan tidak berpola (Wajib, 2016).
- b. Model *Land Sharing II*. Model ini menggunakan sistem pembagian lahan yang terjadi dengan beberapa kondisi yaitu: (1) lahan dimiliki oleh satu orang/instansi, (2) lahan sebelumnya dalam keadaan kosong diokupasi/dihuni secara liar oleh sekelompok orang, (3) lahan direncanakan untuk digunakan kembali oleh pemilik dengan konsekuensi membagi lahan menjadi dua —sebagian besar untuk pemilik lahan dan sisanya untuk pemukim liar, (4) keputusan bersama/atas persetujuan dua belah pihak, dan (5) masyarakat bersedia berperan aktif dalam proses tersebut —ikut serta dalam memberikan ide/pemikiran (Angel dan Boonyabanha, 1988).
- c. Model *Land Readjustment*. Model ini menggunakan cara menata kembali yang pelaksanaannya didasarkan pada beberapa kondisi: pertanian yang diperjualbelikan secara acak, (2) lahan kemudian dibangun/dihuni oleh pemilik, biasanya bentuk lahan tidak beraturan atau kurang sarana prasarana seperti jalan lingkungan, taman dan

pedestrian, (3) pemilik ingin menata lahan untuk meningkatkan kualitas permukiman dan harga lahan, (4) pengaturan lahan secara keseluruhan disesuaikan dengan proporsi 70%-30%, yaitu 70 untuk pemilik dan 30 untuk fasilitas (jalan dan taman), (5) dilakukan bersama-sama dengan persetujuan semua pihak (Doebele dalam William , 1983)

- d. Model Konsolidasi Lahan (*Land Consolidation*). Model ini merupakan bentuk pengelolaan tata guna lahan dengan mengatur kembali penggunaan dan penguasaan bidang-bidang tanahnya. Tujuan dari konsolidasi lahan adalah menata wilayah yang semula tidak teratur menjadi teratur dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta kemudahan yang dibutuhkan di lahan tersebut sehingga lahan bisa digunakan secara optimal dimana pelaksanaannya dilaksanakan oleh masyarakat sendiri secara swadaya.
- e. Model *Resettlement*. Model ini biasa dikenal dengan program transmigrasi. Menurut Johara (1999), *resettlement* atau permukiman kembali pada umumnya dilakukan melalui program transmigrasi yaitu perpindahan penduduk (migrasi) dari daerah yang padat penduduk (umumnya pulau jawa) ke daerah yang masih jarang penduduknya (biasanya luar pulau jawa) yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih luas dan kehidupan yang lebih layak sekaligus meningkatkan integrasi nasional baik segi ekonomi maupun sosial.
- f. Model Pembangunan Rumah Susun. Pembangunan rumah susun adalah model penanganan pemukiman perkotaan mencoba merubah kondisi lingkungan pemukiman padat penduduk dan dinilai tidak memenuhi syarat sebagai tempat hunian yang layak menjadi tempat yang memenuhi standar hunian layak. Caranya adalah dengan mengganti luas lahan perumahan dengan meningkatkan luas lantai.
- g. Model Program Perbaikan Kampung atau *Kampung Improvement Program* (KIP). KIP adalah pola pembangunan kampung yang berdasar pada partisipasi masyarakatnya untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemenuhan kebutuhannya. Prinsip universal dari program ini adalah memberdayakan dan menjadikan warga sebagai penentu dan penerima manfaat sumber daya kota guna memperbaiki taraf hidup dan kemampuan untuk maju (Wajib, 2016).

2. Integrasi dan Koordinasi dalam Penataan Permukiman Kumuh

Istilah terintegrasi dalam konteks penataan permukiman kumuh mengacu pada pendekatan THIS (tematik, holistik, integratif, dan spasial) dalam pembangunan (BAPPENAS, 2018). Pendekatan THIS menekankan bahwa proses pembangunan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring-evaluasi didasarkan pada prinsip-prinsip holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan THIS adalah penjabaran tema prioritas pembangunan ke dalam proses pembangunan (mengutamakan tahapan perencanaan) yang menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan

yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah (BAPPENAS, 2018).

Di sisi lain, secara substantif, istilah “integratif” atau “terintegrasi” dalam konteks penataan permukiman kumuh juga dipahami sebagai bentuk penataan permukiman kumuh yang berorientasi pada aspek dasar pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara teknis, penataan permukiman kumuh terintegrasi mencakup ketersediaan akses dasar seperti air bersih dan sanitasi; akses layanan kesehatan; akses sosial (terdapat ruang interaksi publik); dan akses lingkungan (terdapat ruang terbuka hijau) yang mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Koordinasi dalam konteks penanganan permukiman kumuh terintegrasi menjadi sangat krusial karena kebijakan prioritas nasional ini dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah/lintas sektor. Dalam penelitian ini, analisis terkait koordinasi diarahkan pada jenis koordinasi (*vertical*, *horizontal*, dan fungsional). Selain itu, praktik koordinasi diukur berdasarkan indikator koordinasi, diantaranya (Handyaningrat, 1989):

- 1) Komunikasi
 - a. Ada tidaknya informasi
 - b. Ada tidaknya alur informasi
 - c. Ada tidaknya teknologi informasi
- 2) Kesadaran Pentingnya Koordinasi
 - a. Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi
 - b. Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi
- 3) Kompetensi Partisipan
 - a. Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat
 - b. Ada tidaknya ahli di bidang pembangunan yang terlibat
- 4) Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi
 - a. Ada tidaknya bentuk kesepakatan
 - b. Ada tidaknya pelaksana kegiatan
 - c. Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan
 - d. Ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi
- 5) Kontinuitas Perencanaan
 - a. Ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subyek pembangunan
 - b. Ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan

3. Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Permukiman Kumuh

Partisipasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam satu atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan dan adanya pembagian wewenang atau tanggung jawab bersama. Dalam prakteknya, keberhasilan proses pembangunan dan pengembangan inovasi bergantung pada derajat/tingkatan partisipasi para pemangku kepentingan. Arnstein (1971) merumuskan konsep delapan tangga partisipasi masyarakat (*Eight Rungs on Ladder of Citizen Participation*) yang dapat digunakan untuk menilai kualitas partisipasi masyarakat. Menurut konsep dari Arnstein ia mengatakan bahwa “partisipasi masyarakat yang didasarkan kepada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir, tiap tangga dibedakan berdasarkan *corresponding to the extent of citizen’s power in determining the plan and/or program*”. Dalam model ini secara umum ada tiga derajat partisipasi masyarakat:

- a. Tidak Partisipatif (*Non-Participation*)
- b. Derajat Semu (*Degrees of Tokenism*)
- c. Kekuatan Masyarakat (*Degrees of Citizen Powers*)

Cohen dan Uphoff (1977) juga menambahkan bahwa yang membedakan partisipasi atas empat jenis berdasarkan sistem dan mekanisme partisipasi, antara lain *participation in decision making*, *participation in implementation*, *participation in benefit*, dan *participation in evaluation*. Konsep partisipasi menjadi dasar analisis peran *stakeholder* dalam penataan permukiman kumuh terintegrasi di Kota Semarang. Selanjutnya, analisis partisipasi dapat dilihat dari derajat *participation ladder* seperti dalam tabel berikut:

Tabel 1

Tingkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat

8	<i>Citizen Control</i>	<i>Degree of Citizen Control</i>
7	<i>Delegate Power</i>	
6	<i>Partnership</i>	
5	<i>Placation</i>	<i>Degree of Tokenism</i>
4	<i>Consultation</i>	
3	<i>Informing</i>	
2	<i>Therapy</i>	<i>Non-Participation</i>
1	<i>Manipulation</i>	

Sumber: Arnstein (1971)

PENELITIAN TERDAHULU

Dalam proses penyusunan proposal penelitian, tim peneliti telah melakukan studi literatur dan analisis komparatif sederhana pada beberapa referensi/penelitian terdahulu. Deskripsi penelitian terdahulu dan hasil temuan yang relevan dengan topik rancangan penelitian tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
Anwar Rusgiyanto (2005)	Strategi Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Di Tepi Kali Semarang	Penyusunan strategi peningkatan kualitas lingkungan permukiman Kali Semarang untuk memperbaiki citra perkampungan kota di Semarang	Analisis normatif dan deskriptif, serta analisis SWOT. Metode pengumpulan data: primer dan sekunder	Strategi peningkatan kualitas lingkungan permukiman Kali Semarang
Mustofa Kamal (2005)	Manfaat Penataan Permukiman Kumuh Terhadap Masyarakat Nelayan Di Kawasan Bandengan Kabupaten Kendal	Kajian terhadap manfaat penataan permukiman kumuh melalui pembangunan sarana dan prasarana di kawasan nelayan Kota Kendal	Analisis deduktif, analisis normatif dan deskriptif. Metode pengumpulan data: primer dan sekunder.	Mengetahui kebermanfaatan penataan permukiman kumuh terhadap masyarakat nelayan Kota Kendal
Dwi Walojo, Johan Silas, Haryo Sulistiyarso (2010)	Konsep Penataan Kawasan Permukiman Nelayan Ngemplakrejo Sebagai Dampak Pengembangan Kota Pasuruan	Identifikasi pengembangan Kota Pasuruan yang tidak berpengaruh pada perkembangan permukiman nelayan Ngemplakrejo	Analisis faktor dan analisis dengan metode triangulasi. Menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif	Perumusan konsep penataan permukiman nelayan Ngemplakrejo.
Wahyu Anggraini (2012)	Strategi Komunikasi Kementerian Perumahan Rakyat Dalam Sosialisasi Program Penanganan	Implementasi program penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh terutama di	Analisis eksploratif. Menggunakan metode kualitatif.	Mengetahui permasalahan pada kondisi kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tamansari,

	Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2KBK)	kawasan Tamansari Kota Bandung.		meliputi kondisi fisik bangunan, sarana dan prasarana, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam program penanganan kawasan permukiman kumuh.
--	--	---------------------------------	--	--

Dari daftar penelitian terdahulu di atas, terdapat beberapa *novelty* atau *state of the art* dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Terlihat bahwa pada umumnya kajian penataan permukiman kumuh difokuskan pada perbaikan fisik lingkungan. Lebih komprehensif, penelitian ini mengulas aspek kebijakan dan koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat (Kementerian PUPR) dengan pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) dengan indikator pengukuran yang jelas;
2. Ulasan seputar revitalisasi atau penataan permukiman/kampung kumuh menjadi kampung wisata tematik telah banyak dipublikasikan dalam jurnal. Akan tetapi, sedikit peneliti yang melakukan kritik atas fenomena kota/kampung wisata yang menjadi viral karena konsep warna-warni. Perlu ditelaah apakah tren wisata tematik tersebut benar-benar menonjolkan potensi/kekhasan wilayah dan benar-benar melibatkan masyarakat dalam proses penataannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi literatur dan pengumpulan data sekunder. Secara umum, tulisan ilmiah ini memberikan gambaran atau uraian yang bersifat deskriptif tentang fenomena penataan permukiman kumuh (Sugiyono, 2011). Pemilihan metode dan pendekatan penelitian didasarkan pada jenis data yang digunakan dan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis, menginterpretasi, dan menyajikan data dan informasi (Achmadi & Narbuko, 2004). Selain itu, melalui metode ini, peneliti dapat menggambarkan dan mengkaji fenomena yang ada serta menawarkan solusi atas penataan permukiman kumuh.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Semarang tepatnya di Kelurahan Randusari. Pemilihan lokus tersebut juga mengacu pada *roadmap* kebijakan prioritas percepatan penanganan permukiman kumuh di Indonesia, khususnya di Jawa. Kota Semarang merupakan salah satu kota dari 30 kota prioritas program percepatan penanganan permukiman kumuh dengan total anggaran 50 Milyar yang berhasil merubah permukiman kumuh menjadi lokasi wisata. Secara spesifik, Kelurahan Randusari merupakan salah satu

lokus prioritas penanganan permukiman kumuh berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang No. 050/801/2014 tentang penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang. Selain hal tersebut, pemilihan lokus di Kota Semarang juga didasari oleh ketertarikan penulis terhadap popularitas dan keberhasilan Kampung Pelangi sebagai destinasi wisata sekaligus sebagai *best practice* transformasi penataan kampung kumuh menjadi kampung tematik.

Sumber data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan FGD dengan Kementerian PUPR - Ditjen Cipta Karya (program KOTAKU). Sedangkan data sekunder diperoleh melalui *website* pemerintah /non-pemerintah di Kota Semarang; *website* Kementerian PUPR - Ditjen Cipta Karya (program KOTAKU), dokumen terkait pelaksanaan dan dokumen berupa laporan (LAKIP) terkait penyelenggaraan penataan permukiman kumuh terintegrasi di Kota Semarang serta kajian kepustakaan.

Secara umum, tahapan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Pengumpulan Data (*Data Collection*), Reduksi Data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*), penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*). Dalam proses analisis data, penulis melakukan *crosschecked* untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data. Dalam hal ini, teknik keabsahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu dengan melakukan tinjauan informasi dari para informan (Miles and Huberman, 2005).

PEMBAHASAN

Terdapat beberapa program penataan permukiman kumuh di Kota Semarang, yaitu:

- a. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
- b. Program Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran melalui Harmonisasi Ekonomi, Edukasi, Ekosistem dan Etos Bersama Masyarakat atau disingkat “Gerbang Hebat” merupakan sebuah program inovatif dari pemerintah untuk mengubah lingkungan kumuh menjadi lebih tertata sehingga dapat merubah status kumuh dari suatu wilayah serta meningkatkan daya saing Kota Semarang. “Gerbang Hebat” memiliki beberapa fokus program, diantaranya; program Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM), penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Keluarga Miskin (SIMGAKIN), E-Waroeng, dan Kampung Tematik. Program “Gerbang Hebat” yang relevan dengan penataan permukiman kumuh adalah Kampung Tematik yang menasar target perubahan pada aspek ekonomi, edukasi, ekosistem dan etos masyarakat sekitar.
- c. Program *Kampung Improvement* “Kampung Pelangi”, mencakup peningkatan kualitas permukiman melalui penghijauan, peremajaan infrastruktur, perbaikan lokasi kumuh menjadi tidak kumuh, pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program, dan perbaikan

sanitasi untuk meningkatkan potensi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Berdasarkan *roadmap* pembangunan dan penataan permukiman kumuh di Kota Semarang, program Kampung Pelangi dapat dikategorikan sebagai bentuk integrasi program kampung tematik “Gerbang Hebat” dan Kampung Pelangi. Untuk itu, perencanaan dan pembangunan Kampung Pelangi juga mengacu pada program kampung tematik dimana kedua program tersebut dimaksudkan untuk mengurangi jumlah permukiman kumuh perkotaan.

Integrasi dan Koordinasi Penataan Permukiman Kumuh: Analisis Berdasarkan Indikator Koordinasi

Mengacu pada konsep THIS, pendekatan integratif yaitu pendekatan dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan. Yang dimaksud dengan “integratif” adalah upaya keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Dalam konteks penataan permukiman kumuh, makna integratif atau terintegrasi adalah keterpaduan peran, wewenang, dan sumberdaya dari pemangku kepentingan/*stakeholder* pembangunan dalam program penataan permukiman kumuh. Bentuk dari keterpaduan dalam aspek normatif ini dipahami sebagai sebuah kesesuaian dan keteraturan penataan permukiman kumuh pada tingkat daerah (Kab/Kota) dengan kebijakan atau peta jalan penataan permukiman kumuh pada tingkat regional (Provinsi) dan pusat (Kementerian PUPR). Bentuk integrasi dalam konteks ini dapat berupa pengelolaan bersama seperti program KOTAKU dengan mekanisme *budget sharing*. Keterpaduan yang dimaksud dapat dijelaskan melalui analisis koordinasi dengan indikator yang telah ditetapkan, diantaranya:

a. Komunikasi

Dalam program KOTAKU, komunikasi antar aktor telah terjalin pada level Kelurahan melalui proses pendataan. Komunikator yang paling berperan dalam tahap ini adalah lembaga masyarakat di Kelurahan, dikenal sebagai Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM). BKM/LKM melakukan pendataan kondisi awal (*baseline*) 7 indikator kumuh di Desa/Kelurahan masing-masing. Data tersebut diintegrasikan antara dokumen perencanaan masyarakat dan dokumen perencanaan Kabupaten/Kota untuk menentukan kegiatan prioritas mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru.

BKM akan menjadi faktor yang dapat mempercepat tercapainya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan karena sudah berpengalaman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan. BKM ini “direvitalisasi” dari sebelumnya yang terfokus pada penanggulangan kemiskinan, kini berorientasi ke penanganan kumuh. Lebih lanjut, dalam program KOTAKU, komunikasi dilakukan oleh tim fasilitator dari Kementerian PUPR, perwakilan tim BAPPEDA Bersama Pemerintah Kota Semarang, beserta para fasilitator yang tergabung dalam BKM

sebagai perwakilan masyarakat. Komunikasi dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui rapat, diskusi terbatas, dan pengarahan serta instruksi. Sedikit berbeda dengan KOTAKU, dalam program “Gerbang Hebat” dan Kampung Pelangi, komunikasi dilakukan secara langsung dengan warga masyarakat sekitar. Akan tetapi, pada tahap perumusan, komunikasi dilakukan melalui perwakilan dari Kelurahan dan RT/RW.

b. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Penyelenggaraan Program KOTAKU sendiri mempunyai dasar regulasi melalui Surat Edaran Nomor: 02/SE/DC/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya dimaksudkan sebagai acuan kegiatan padat karya di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring agar sasaran kegiatan padat karya dapat tercapai sesuai tujuan. Surat Edaran tersebut bertujuan untuk mewujudkan hasil yang efektif dan efisien sesuai dengan sasaran program yang telah ditetapkan.

Implementasi Program KOTAKU yang diintegrasikan bersama program Kampung Tematik di Kota Semarang adalah salah satu bukti adanya koordinasi yang terbangun antara program yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan program yang dirancang oleh pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang. Sebagai program yang bersifat *top-down*, KOTAKU sangat sukses. Selain KOTAKU, kebijakan *top-down bottom-up* melalui program Kampung Tematik dan Kampung Pelangi juga berhasil melibatkan masyarakat dalam proses koordinasi.

Melalui koordinasi dan peningkatan kesadaran dalam program penataan permukiman kumuh KOTAKU, Kampung Tematik dan Kampung Pelangi, masyarakat dapat mengembangkan potensi ekonomi sembari membangun karakter masyarakat yang mendidik (tradisi dan kearifan lokal), *home industry* ramah lingkungan, serta menciptakan ciri khas masyarakat yang tidak dimiliki oleh kampung lain. Khusus pada program Kampung Pelangi, terdapat Kelompok Sadar Wisata atau lebih dikenal sebagai Pokdarwis. Pokdarwis dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesiapan warga menyambut wisatawan. Adapun anggota kelompok ini adalah perwakilan dari setiap RT dan RW. Tujuan utama kelompok ini adalah sebagai penanggung jawab terhadap keberlangsungan Kampung Pelangi. Oleh karena itu, secara tidak langsung, kelompok ini merupakan tim yang dibentuk untuk mengurus hal-hal administratif, pengawas ketertiban dan disiplin masyarakat serta motor penggerak kegiatan-kegiatan positif untuk menarik minat wisatawan terhadap Kampung Pelangi. Adapun beberapa program kerja Pokdarwis adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan fisik Kampung Pelangi, dengan menitikberatkan pada perbaikan fisik seperti pengecatan rumah, pembangunan jembatan di setiap gang/pintu masuk, tulisan Kampung Pelangi, gardu pandang, tandon, penunjuk arah, dan pembuatan peta untuk memudahkan wisatawan menikmati area Kampung Pelangi

2. Penyelenggara acara. Mengingat bahwa Kampung Pelangi dikategorikan sebagai salah satu destinasi wisata yang cukup terkenal, Pokdarwis Kampung Pelangi terus berusaha mengembangkan potensi Kampung Pelangi dengan mengadakan berbagai macam *event*, diantaranya festival kuliner (berkerjasama dengan Djarum), lomba melukis, lomba kerja siswa LKS bidang fotografi, peringatan pada hari-hari besar nasional (17 Agustus dan hari besar keagamaan), dan beberapa kegiatan yang dilakukan bersama Pemerintah Kota Semarang.
3. Kegiatan kebersihan lingkungan. Kegiatan ini dilakukan setiap Minggu pagi, selain itu Pokdarwis bersama masyarakat sekitar juga menyediakan tempat sampah di setiap titik-titik strategis sepanjang gang yang ditujukan bagi para wisatawan untuk menjaga kebersihan lingkungan.
4. Pelatihan dan sosialisasi. Kegiatan ini merupakan hasil konsolidasi dengan Dinas terkait, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, dan lembaga keterampilan lainnya diantaranya, pelatihan pembuatan souvenir, pembuatan barang dari bahan *recycle*, pelatihan pembuatan kaos sablon dan pelatihan pembuatan makanan tradisional.

c. Kompetensi Partisipan

Keberhasilan program KOTAKU, Kampung Tematik dalam “Gerbang Hebat”, dan Kampung Pelangi tidak lepas dari partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Mengutip Cahyaningrum (2019) pelaksanaan Kampung Pelangi mulai dilakukan tanggal 15 April 2017 dengan estimasi 391 unit rumah. Pengecatan dilakukan bersama-sama oleh pemerintah daerah Kota Semarang, tenaga kerja dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang dan masyarakat Wonosari. Proses pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan program Kampung Pelangi juga melibatkan tokoh masyarakat setempat dan komponen kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pemerintah bersama perangkat kampung lain juga turut serta dalam kegiatan sosialisasi ke masyarakat guna memberikan pemahaman tentang pembentukan Kampung Pelangi di lingkungan tempat tinggal mereka.

Selain partisipasi masyarakat dan komponen kelembagaan masyarakat, pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bidang Kelembagaan mengadakan pelatihan kepada kelompok-kelompok sadar wisata yang ada di Kampung Pelangi, Pemerintah Kota Semarang juga melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UMKM memberikan bantuan berupa bimbingan, penyuluhan dan pelatihan kepada ibu-ibu PKK untuk menggali kemampuan pengelolaan sumber ekonomi yang bisa mereka kembangkan. Tidak cukup sampai disitu, dukungan Pemerintah Kota Semarang masih terus ada sampai pada tahap akhir. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk fisik dan non

fisik diantaranya pengadaan lahan parkir dan sejumlah infrastruktur pendukung lainnya. Sedangkan bantuan non-fisik yang diberikan berupa bantuan pembuatan ijin usaha dan bantuan pemberian modal usaha Kredit Wibawa agar masyarakat dapat meningkatkan kemampuannya melalui wisata Kampung Pelangi.

d. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi

Salah satu tantangan yang ditemui oleh pengguna model KOTAKU adalah regulasi/kebijakan tentang penetapan lokasi kumuh oleh Bupati/Walikota. Regulasi merupakan bentuk kesepakatan antara pembuat kebijakan sekaligus perwujudan komitmen politis guna mendukung pelaksanaan program KOTAKU. Di Kota Semarang, Walikota telah menyepakati pemetaan lokasi dan jumlah permukiman kumuh melalui SK Walikota. Secara teknis, dasar hukum tersebut menjadi acuan bagi tim pelaksana program KOTAKU, baik perwakilan dari pusat maupun daerah.

Persoalan krusial lainnya berkenaan dengan insentif koordinasi yang merujuk pada pengelolaan anggaran program KOTAKU. Koordinasi dalam aspek *budgeting* ini dilakukan oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah melalui mekanisme pembiayaan *co-sharing* (dulu bersumber dari dana PNPM Mandiri Perkotaan), dengan regulasi penempatan jumlah penduduk sebagai acuan untuk menentukan besaran alokasi dana DDUB (Dana Daerah untuk Urusan Bersama). Berdasarkan data, banyak daerah (di atas 50% dari total penerima program KOTAKU), tidak dapat memenuhi target DDUB. Akan tetapi, hasil FGD dengan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman-Kementerian PUPR, Kota Semarang berhasil memenuhi target DDUB dan menunjukkan peran strategis dalam pelaksanaan program KOTAKU. Di sisi lain, selain DDUB, sumber pembiayaan program KOTAKU juga berasal dari pinjaman luar negeri melalui lembaga donor, yaitu Bank Dunia, *Islamic Development Bank*, dan *Asian Infrastructure Investment Bank* yang menjadi satu kesatuan pembiayaan demi mencapai target peningkatan kualitas penanganan kumuh yang diharapkan.

Kesepakatan, komitmen pada program Kampung Tematik dan Kampung Pelangi diwujudkan melalui partisipasi aktif Tim “Gerbang Hebat” dan Pokdarwis. Dalam hal ini, insentif koordinatif atau manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dapat diperoleh melalui perubahan perilaku, lingkungan, dan peningkatan pendapatan dari usaha makanan, parkir, dan souvenir.

e. Kontinuitas Perencanaan

Program KOTAKU berakhir pada tahun 2020, untuk itu, kontinuitas perencanaan pada 2021 tidak dapat dicapai. Perencanaan program Kampung Tematik dan Kampung Pelangi terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Semarang didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan, sehingga dapat membantu percepatan penanganan permukiman kumuh. Kontinuitas perencanaan Kampung Tematik tetap dikelola oleh Tim “Gerbang Hebat” tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan dan evaluasi

yang disusun melalui Musrenbang, juga Renstra pada Dinas terkait seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta BAPPEDA.

Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Permukiman Kumuh: Kotaku dan Kampung Pelangi

Peran masyarakat dapat dikategorikan dalam beberapa jenis partisipasi sesuai berdasarkan sistem dan mekanisme partisipasi. Dalam konteks ini, analisis terkait jenis partisipasi masyarakat di kedua lokus penelitian tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3

Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Permukiman Kumuh Melalui Program Kotaku dan Kampung Pelangi

Jenis Partisipasi	Program		
	KOTAKU	Kampung Tematik "Gerbang Hebat"	Kampung Pelangi
<i>Participation in Decision Making</i>	-	√	√
<i>Participation in Implementation</i>	√	√	√
<i>Participation in Benefit</i>	√	√	√
<i>Participation in Evaluation</i>	√*	√	√

Ket: √* = Ada namun sedikit/parsial

Berdasarkan tabel di atas, terdapat perbedaan jenis partisipasi masyarakat pada ketiga program. Masyarakat secara khusus turut serta secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi program Kampung Tematik dan Kampung Pelangi. Tidak hanya jenis partisipasi, identifikasi terkait tingkat partisipasi masyarakat dalam penataan permukiman kumuh dapat pula dikaji dalam perspektif tangga partisipasi Arnstein (1971). Untuk mempermudah analisis, penulis melakukan pengukuran tingkat partisipasi berdasarkan atas tiga aspek utama partisipasi, yaitu pengetahuan, manfaat, dan kehadiran sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4

Analisis Partisipasi Masyarakat Berdasarkan 3 Aspek Partisipasi

Level	Pengetahuan	Manfaat	Kehadiran
<i>Citizen control</i>	Tahu	Tahu	Inisiatif hadir
<i>Delegated power</i>	Tahu	Tahu	Inisiatif hadir
<i>Partnership</i>	Tahu	Tahu	Inisiatif hadir
<i>Placation</i>	Tahu	Tahu	Sukarela
<i>Consultation</i>	Tahu	Tahu	Sukarela
<i>Informing</i>	Tidak tahu	Tahu	Sukarela
<i>Therapy</i>	Tidak tahu	Tahu	Terpaksa
<i>Manipulation</i>	Tidak tahu	Tidak tahu	Terpaksa

Sumber: Permatasari C., Soemirat J., Ainun S., 2018

Lebih detail, hasil analisis tingkat partisipasi dalam penataan permukiman kumuh terangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 5

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Permukiman Kumuh Melalui Program Kotaku dan Kampung Pelangi Berdasarkan Pengukuran 3 Aspek Utama

Lokus	Level	Pengetahuan	Manfaat	Kehadiran
KOTAKU	<i>Partnership</i>	Masyarakat mengetahui informasi tentang program KOTAKU dan mengikuti kegiatan namun tidak kontinyu	Masyarakat mengetahui manfaat program KOTAKU dan memanfaatkan dengan baik fasilitas program KOTAKU	Masyarakat secara sukarela mengikuti kegiatan program KOTAKU
Kampung Tematik	<i>Delegated power</i>	Masyarakat mengetahui informasi tentang program Kampung Tematik dan mengikuti kegiatan dengan kontinyu	Masyarakat mengetahui manfaat program Kampung Pelangi dan memanfaatkan dengan baik fasilitas Kampung Tematik	Masyarakat secara sukarela mengikuti kegiatan program Kampung Tematik
Kampung Pelangi	<i>Delegated power</i>	Masyarakat mengetahui informasi tentang program Kampung Pelangi dan mengikuti kegiatan dengan kontinyu	Masyarakat mengetahui manfaat program Kampung Pelangi dan memanfaatkan dengan baik fasilitas Kampung Pelangi	Masyarakat secara sukarela mengikuti program Kampung Pelangi

Analisis Pola/Model Penataan Permukiman Kumuh di Kota Semarang

Berdasarkan hasil identifikasi model penataan permukiman kumuh, terdapat beberapa indikator penentuan model pada setiap lokasi, diantaranya; pertimbangan status tanah, tingkat kepadatan bangunan, tingkat kekumuhan, kesesuaian dengan kebijakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta Rencana Ulang Tata Ruang (RUTR). Di Kota Semarang, penataan permukiman kumuh melalui program KOTAKU memang tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Di Kota Semarang, program KOTAKU lebih menitikberatkan pada pemenuhan dan perbaikan sarana prasarana. Berbeda dengan Kampung Tematik dan Kampung Pelangi, dimana secara umum, model penataan permukiman kumuh yang digunakan adalah model *Kampung Improvement Program* (KIP). Model Perbaikan Kampung identik dengan konsep/pola peremajaan. Mengacu pada pola peremajaan, penataan permukiman kumuh dilakukan melalui perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak. Dalam penerapan model KIP dan peremajaan, kondisi permukiman kumuh dalam rentang sedang hingga berat dan memiliki status lahan legal (Ratnawulan, 2020).

1. Arah Kebijakan Kampung Tematik di Kota Semarang

Kampung tematik dikembangkan untuk mengatasi kemiskinan terutama permasalahan pemenuhan kebutuhan dasar, mendorong perekonomian lokal dengan menggali potensi ekonomi masyarakat sebagai stimulus pembangunan wilayah, serta peningkatan kualitas lingkungan rumah tinggal masyarakat (Kloczko, 2014). Pembangunan kampung tematik juga dapat dipahami sebagai sebuah pembangunan yang berorientasi pada upaya agregat yang didasarkan pada pembentukan suatu ciri khas yang unik pada sebuah wilayah tertentu. Konsep kampung tematik menurut Idziak, Majewski, & Zmyślony dapat diartikan sebagai sebuah wujud kemandirian entitas sosial yang proaktif dan berkelanjutan (Idziak, *et.al.*, 2015).

Di lain sisi, kampung tematik diartikan sebagai sebuah inovasi sosial yang lahir dari gagasan kreatif komunitas maupun masyarakatnya. Pelaksanaan konsep kampung tematik berdasarkan skema inovasi sosial memiliki tiga tahapan, yaitu *problematization; expression of interest; delineation & coordination*. *Problematization* merupakan tahap pemetaan problematika, dimana masyarakat, secara bersama-sama dapat mencari ide/gagasan dalam mengembangkan kampungnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan perekonomian lokal. Pada tahap *expression of interest*, penentuan tema kampung menjadi fokus utama, kelompok masyarakat dapat membangun kesepakatan tentang keunggulan kampung yang akan dijadikan *brand image* dan penciri kekhasan kampung tematik. Selanjutnya, tahap terakhir adalah deliniasi dan koordinasi melalui gagasan atau tema yang kemudian dimodifikasi oleh berbagai aktor yang terlibat

hingga akhirnya diimplementasikan secara nyata pada wilayahnya (Tamara dan Rahdriawan, 2018).

Pada ranah empiris, tren kampung tematik di Indonesia, selain sebagai strategi pengembangan wisata, dapat pula dimaknai sebagai salah satu bentuk penerapan perbaikan kawasan/permukiman kumuh, liar, tidak tertata (model penataan permukiman kumuh melalui *Kampung Improvement Program* (KIP)). Di Kota Semarang khususnya, program kampung tematik merupakan bagian dari program unggulan “Gerbang Hebat”

2. Best Practice Penataan Permukiman Kumuh Melalui Program Kampung Pelangi di Kota Semarang

Mengacu pada konsep kampung tematik milik Idziak, *et.al.* (2015), didasarkan pada aspek kebermanfaatan dan daya tariknya, Kampung Pelangi di Kota Semarang dapat didefinisikan sebagai kampung tematik. Senada dengan Idziak, *et.al.* (2015), didasarkan pada skema dan arah kebijakan pengembangan kampung tematik oleh Pemerintah Kota Semarang, Kampung Pelangi merupakan salah satu kampung tematik program “Gerbang Hebat” (tahun 2017) yang berhasil mengubah tatanan permukiman kumuh di Kelurahan Randuasri, Kota Semarang.

Dalam konteks penataan permukiman kumuh, transformasi status “kampung kumuh” menjadi “kampung tematik” atau bahkan “kampung wisata” sangat patut diapresiasi, tentu dengan catatan bahwa peremajaan dan perombakan yang dilakukan tidak hanya berkutat pada persoalan estetika, atau keindahan, namun juga fungsi dari sebuah kampung yang memiliki infrastruktur dasar yang layak dan sehat. Pada program penataan permukiman kumuh bertajuk “Kampung Pelangi”, selain menata kawasan kumuh, pemerintah setempat bersama masyarakat dan bantuan fasilitator dari program CSR telah berhasil membangun rumah layak huni, sanitasi, perbaikan tanggul, dan pembersihan sungai, serta membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Selanjutnya, merujuk pada hasil penelitian terdahulu (*Can We Treat Thematic Villages as Social Innovations*, Kloczko, 2014), sebagai sebuah inovasi sosial, keberhasilan tata kelola kampung tematik sangat bergantung pada tingkat keberdayaan masyarakat khususnya dalam menerapkan model inovasi. Menurut Utomo (2017), model inovasi menentukan *grand design* inovasi dan arah inovasi. Penerapan model inovasi menjadi elemen krusial yang berdampak signifikan pada proses penciptaan inovasi, pengelolaan inovasi, hingga keberlanjutan inovasi.

Dalam proses pengembangannya, Kampung Pelangi menggunakan model inovasi replikasi atau *replication model*, dimana upaya pengembangan inovasi

didasarkan pada tindakan meniru produk/proses/metode inovasi yang telah ada/berhasil di tempat lain. Berkenaan dengan replikasi dari *best practice* penataan kampung kumuh, Rio De Janeiro, Brazil telah diakui dunia sebagai pelopor *slum tourism* yang mengusung konsep warna-warni. Di Indonesia, Kampung Warna-warni Jodipan di Kota Malang telah lebih dulu mereplikasi pola penataan permukiman kumuh seperti Rio De Janeiro, Brazil pada tahun 2016 akhir. Selanjutnya, pada tahun 2017, Kota Semarang turut meramaikan tren penataan permukiman kumuh melalui pengembangan wisata warna-warni. Hingga kini, model replikasi ini telah dilakukan oleh puluhan kota seperti Yogyakarta, Banjarbaru, Tanjung Pinang, Banyuwangi, Surabaya, dll.

Secara konseptual, model replikasi Kampung Pelangi dapat bersifat murni duplikasi atau modifikasi inovasi. Adapun tahapan inovasi dalam model replikasi adalah (Utomo, 2017):

- Mengenali karakter inovasi yang akan direplikasi;
- Mengenali kebutuhan inovasi yang akan direplikasi;
- Melakukan modifikasi sesuai kebutuhan;
- Menggalang dukungan dari berbagai pihak;
- Implementasi dan monitoring hasil/dampak inovasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisa dan pengolahan data, didapatkan kesimpulan bahwa integrasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penataan permukiman kumuh di Kota Semarang terjalin dengan sangat baik. Komunikasi dan kordinasi sudah terjalin sejak sebelum program berjalan (tahapan perencanaan). Pemerintah pusat melalui fasilitator KemenPUPR, Pemerintah Daerah melalui Bappeda, serta perangkat desa membangun komunikasi yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui rapat, diskusi terbatas, dan pengarahan serta instruksi. Partisipasi masyarakat dalam penataan permukiman kumuh terintegrasi di Kota Semarang juga sudah berjalan dengan baik, hal ini ditandai dengan keikutsertaan masyarakat (atau perwakilan warga tiap RT dan RW) sejak tahapan perencanaan program, pengambilan keputusan, pengerjaan, hingga tahapan evaluasi program berjalan dengan baik menciptakan sinergitas diantara stakeholder yang ada. Sedangkan model penataan permukiman kumuh dalam penataan permukiman kumuh di Kota Semarang melalui program KOTAKU memang tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Di Kota Semarang, karena menitikberatkan pada pemenuhan dan perbaikan sarana prasarana. Model Perbaikan Kampung identik dengan konsep/pola peremajaan. Mengacu pada pola peremajaan, penataan permukiman kumuh dilakukan melalui perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum

perumahan dan permukiman dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi dan Narbuko. (2004). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Angel, S., & Boonyabancha, S. (1988). Land sharing as an Alternative to Eviction. *Third World Planning Review* Vol 10, 107-127.
- Anggraini, Wahyu. (2012). "Strategi Komunikasi Kementerian Perumahan Rakyat Dalam Sosialisasi Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2KBK), Skripsi, Bandung: Telkom University.
- Arnstein, Sherry R. (1971). *Eight Rungs on the Ladder of Citizen Participation in Edgar S. Cahn and Barry A. Passet, Citizen Participation: Affecting Community Change*. New York: Praeger Publishers.
- BAPPENAS. (2018). Perencanaan Pembangunan yang Holistik dan Terintegrasi untuk Meningkatkan Manfaat Hasil Pengadaan Barang dan Jasa. Paparan Disampaikan dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2018 di Jakarta, 17 Juli 2018.
- Handyaningrat. (1989). *Manajemen Konflik*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Idziak, W., Majewski, J., & Zmys lony, P. (2015). *Community Participation in Sustainable Rural Tourism Experience Creation: A Long-Term Appraisal and Lessons From a Thematic Villages Project in Poland*. *Journal of Sustainable Tourism* , 23 (8–9), 1341–1362. doi:10.1080/09669582.2015.1019513.
- Kamal, Mustofa. (2005). "Manfaat Penataan Permukiman Kumuh Terhadap Masyarakat Nelayan Di Kawasan Bandengan Kabupaten Kendal", Tesis. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Kloczko-Gajewska. 2014. *Can We Treat Thematic Villages as Social Innovations?* *Journal of Central European Green Innovation* 2 (3) pp. 49-59.
- Moleong, J. Lexy. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ndraha, Taliziduhu. (2003). *Keybernology: Ilmu Pemerintah Baru*. Jakarta.
- Rahardjo, Adisasmita. (2010). *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ratnawulan, Yuke. (2020). Konsep Penataan Permukiman Kumuh Terintegrasi. Bahan Paparan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman disampaikan pada FGD Penelitian Dosen Politeknik STIA LAN Jakarta 2020.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Rusgiyanto, Anwar. (2005). "Strategi Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman di Tepi Kali Semarang", Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sugiyono (2011), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta:2011.
- Tamara, A, P., & Rahdriawan, M. (2018). *Kajian pelaksanaan konsep kampung tematik di kampung hidroponik Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang*. Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 6 (1), 40-57. <http://dx.doi.org/10.14710/jwl.6.1.40-57>
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. (2005). *Qualitative Data Analysis* (Terjemahan). Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional.
- Utomo, T. W. W. (2017). *Model Inovasi Desa Untuk Optimalisasi Dana Desa*. Paparan Laboratorium Inovasi LAN.
- Wajib, Nurwino. (2016). Alternatif Model Penanganan Permukiman Kumuh. Bahan Pelatihan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) OC 1 Provinsi Sumatera Utara. (online), diakses melalui <http://kotaku.pu.go.id/view/3863/alternatif-model-penanganan-permukiman-kumuh> pada Senin, 10 Agustus 2020.
- Walojo, Dwi, Johan Silas, Haryo Sulistiyarso. (2010). "Konsep Penataan Kawasan Permukiman Nelayan Ngemplakrejo Sebagai Dampak Pengembangan Kota Pasuruan", Artikel pada Seminar Nasional Perumahan Permukiman Dalam Pembangunan Kota diselenggarakan oleh Jurusan Arsitektur ITS, Surabaya.
- William. (1983). *Land Readjustment: A Different Approach to Financing Urbanization*. (W. A. Doebele, Ed.). United States (US): Lexington Books.